

ANALISIS SWOT FAKTOR DAN DAMPAK PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN

**Oleh:
Hanin Kusuma Ardy
Arisman**

haninkusuma3@gmail.com, arismanbpsdm@gmail.com

Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK

Untuk menciptakan program kemandirian dan asimilasi yang optimal, tentunya dibutuhkan upaya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Selain itu juga harus mengetahui dampak yang akan diberikan terhadap instansi sehingga pola pembinaan yang diberikan dapat berfungsi optimal baik bagi WBP maupun bagi instansi. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui kegiatan observasi dan wawancara. Upaya identifikasi faktor yang terkait dengan penelitian dilakukan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Faktor kekuatan tertinggi faktor kerja sama dan dedikasi tinggi petugas pemasyarakatan dengan nilai 0.8 dan faktor kelemahan tertinggi yaitu faktor kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan yang ada dibanding dengan yang dibutuhkan dengan nilai 1. Sedangkan faktor peluang tertinggi yaitu faktor lokasi lapas yang strategis yakni berdekatan dengan instansi-instansi pemerintah dengan nilai 0.88 dan faktor ancaman tertinggi yaitu faktor penyelundupan barang-barang terlarang melalui WBP yang melakukan asimilasi di luar lapas dengan nilai 1.1. Melihat dari hasil perhitungan nilai IFAS dan EFAS yakni -0.24 dan -0.14 maka disarankan untuk menggunakan strategi defensif atau bertahan yang digambarkan dalam grafik kuadran.

Kata Kunci: *SWOT, Faktor, Dampak, Pembinaan Kemandirian, Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan menjadi sistem dalam pemidanaan yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1964¹. Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, Indonesia menganut sistem kepenjaraan yang dalam menangani tahanan dan narapidana menggunakan paradigma retributif, penjeraan, dan resosialisasi. Paradigma retributif ini cenderung mengaplikasikan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku pidana. Paradigma retributif berfokus hanya pada latar belakang pemidanaan dan dampak dari pemidanaan terhadap pelaku pidananya saja yang mana dalam hal ini pula, satu-satunya pihak yang mengalami gangguan terhadap kesejahteraannya yakni pelaku pidana tidak mendapatkan perhatian

¹ Ilham, A. R. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan. *Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia*, 5(1), 1-12

khusus dalam kesejahteraannya dari pemerintah². Sedangkan paradigma penjeraan menganggap pembedaan sebagai bentuk penjeraan terhadap pelaku pidana, dan paradigma resosialisasi menganggap bahwa pelaku pidana merupakan orang yang memiliki tingkat sosialisasi rendah³.

Sebagai negara hukum yang berideologi Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Indonesia menilai bahwa sistem kepenjaraan bersama beberapa paradigma di atas tidak sesuai dengan ideologi dan landasan konstitusional beserta cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, salah seorang tokoh di Indonesia yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Indonesia yakni Bapak Sahardjo menyatakan sistem pemasyarakatan sebagai sistem yang dianut Indonesia dalam menjatuhkan pembedaan kepada pelaku pidana⁴. Penggunaan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila di Indonesia ditunjukkan dengan penetapan peraturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 yang memiliki substansi pembahasan mengenai pemasyarakatan. Berangkat dari peraturan tersebut, secara tidak langsung juga merubah paradigma yang digunakan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yakni resosialisasi dan reintegrasi sosial⁵. Reintegrasi sosial melihat suatu tindak pidana merupakan bentuk dari adanya konflik atau gesekan antara pelaku dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia, pemerintah merujuk pada peraturan internasional mengenai Hak Asasi Manusia yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh majelis PBB dan regulasi mengenai standar perlakuan minimum terhadap penghuni penjara yang dibentuk oleh Nelson Mandela dalam transkrip yang dikenal dengan sebutan *Mandela Rules*.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1995, bahwa pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mewujudkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang bertanggung jawab, bijaksana, dan dapat ikut serta dalam pembangunan nasional serta dapat kembali dan diterima oleh masyarakat melalui berbagai macam bentuk proses yang meliputi perawatan,

² Widiartana, G. (2017). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana. *Justitia et Pax*, 33(1), 1-23. <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>

³ Dwiartmodjo, H. (2013). PELAKSANAAN PIDANA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). *Perspektif*, 18(2), 64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>

⁴ Jenderal Pemasyarakatan, D. (n.d.). *Sejarah*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Retrieved April 19, 2021, from <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah#:~:text=Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali,sebagai tujuan dari pidana penjara>

⁵ Samosir, J., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Sikumbang, J. (2017). IMPLEMENTASI ASIMILASI KERJA SOSIAL NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA SOSIAL SEBAGAI UPAYA REINTEGRASI SOSIAL. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699

pembinaan, dan pembimbingan. Ketiga bentuk proses tersebut dapat masuk dalam kategori bentuk pelayanan. Oleh karena itu, pemasyarakatan juga disebut sebagai lembaga pelayanan publik karena tidak melulu melayani tahanan, narapidana, dan klien pemasyarakatan saja, namun juga melayani keluarga dan masyarakat yang memiliki kaitan dengan ketiga subyek tersebut. Perawatan yang didapat oleh napitah dan klien berupa fisik dan mental. Sedangkan pembinaan dibedakan menjadi dua yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian⁶. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat berfungsi terhadap WBP agar menjadi pribadi yang lebih baik⁷. Pembinaan kepribadian memiliki sasaran terhadap jasmani dan rohani WBP. Sedangkan pembinaan kemandirian memiliki sasaran untuk menumbuhkan dan mengembangkan bakat dan minat WBP dalam keterampilan dan kegiatan kerja⁸.

Pembinaan kemandirian tidak serta merta direncanakan dan dilaksanakan tanpa ada pemetaan yang matang. Melalui kegiatan asesmen yang dilakukan kepada setiap WBP, petugas pemasyarakatan khususnya bagian pembinaan dan pembimbingan WBP menjadi tahu apa bakat, minat, dan keterampilan yang dimiliki WBP sehingga program pembinaan khususnya kemandirian dapat disediakan dan direncanakan dengan baik. Pembinaan menjadi salah satu faktor penilaian WBP yang berpengaruh terhadap upaya mendapatkan program integrasi yang mana dalam hal ini termasuk juga asimilasi. Kecenderungan bentuk atau pola pembinaan kemandirian yang berdaya hasil, membuat pemasyarakatan membuka mata bahwa melalui kegiatan tersebut, WBP yang notabene dipandang sebelah mata oleh masyarakat ternyata dapat ikut berkontribusi dalam membantu keuangan negara. Dibalik tujuan untuk membantu keuangan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui proses penjualan hasil karya WBP kepada masyarakat, pembinaan kemandirian ini juga diharapkan agar timbul rasa percaya diri WBP sebagai upaya perbaikan mental WBP yang tentunya dinilai mengalami penurunan akibat dari tindak pidana yang dilakukan dan proses pemidanaan yang mengikutinya.

Sebagai upaya pencapaian tujuan pemasyarakatan dengan paradigma reintegrasi sosial dengan ciri-ciri adanya campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan, adanya asimilasi baik secara intramural maupun ektramural menjadi jalan keluarnya. Asimilasi merupakan proses pembauran WBP dengan masyarakat melalui kegiatan pembinaan yang

⁶ UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, (1995). www.bphn.go.id

⁷ Wahyudi, N. B. (2017). *PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995*. 53(9), 1689-1699

⁸ Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. (2014). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Administrasi Publik*, 1(6), 1266-1275

dilakukan baik di dalam maupun di luar area lembaga pemasyarakatan⁹. Salah satu lembaga pemasyarakatan yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban, yang berada di area Kanwil Jawa Timur dan sebagai tempat penelitian penulis, memiliki salah satu program asimilasi yang istimewa yakni dengan dibentuknya Wahana Asimilasi dan Edukasi (WAE) yang berada di luar area lembaga pemasyarakatan. Produk yang dihasilkan dari WAE berupa telur, lele, dan minyak serai. Tidak hanya program asimilasi secara ektramural saja yang istimewa, namun yang dilakukan secara intramural juga memiliki keistimewaan. Kerja sama yang dibangun oleh lembaga pemasyarakatan bersama Badan Latihan Kerja Indonesia (BLKI) di Tuban menghasilkan jenis-jenis program pembinaan yang berdaya hasil, mulai dari meja dan kursi baik dari kayu maupun logam, pembuatan pagar dari logam, makanan ringan seperti donat dan gorengan, dan masih banyak jenis pembinaan lainnya. Untuk menciptakan program kemandirian dan asimilasi yang optimal, tentunya dibutuhkan upaya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Selain itu juga harus mengetahui dampak yang akan diberikan terhadap instansi sehingga pola pembinaan yang diberikan dapat berfungsi optimal baik bagi WBP maupun bagi instansi.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban?
2. Bagaimana pengaruhnya terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban?

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui kegiatan observasi dan wawancara terhadap narapidana dan petugas dalam bidang pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Upaya identifikasi faktor yang terkait dengan penelitian dilakukan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang mana mengidentifikasi dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di lokasi penelitian yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Hasil identifikasi dan analisis dipaparkan secara deskriptif.

1. Komponen Analisis SWOT

Analisis SWOT terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini tersusun dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal tersusun dari peluang

⁹ Asrida, Tities, R.B. Sularto, A. M. E. S. A. (2017). Peran Masyarakat dalam Proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. *Jurnal Sosial, Asimilasi*, 6(12), 1-16

dan ancaman yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban (Muhammad, 2018).

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi suatu instansi atau organisasi yang bersifat mendukung dan menunjang yang berasal dari dalam instansi

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan merupakan faktor yang mempengaruhi instansi atau organisasi secara negatif yang berasal dari dalam organisasi. Kelemahan ini juga dapat berpengaruh dalam setiap keputusan atau tindakan preventif, antisipatif, bahkan tindakan penyelesaian strategis yang dialami oleh organisasi.

c. Peluang (*Opportunities*)

Peluang merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi dan bersifat positif yang dapat mempengaruhi jalannya organisasi atau instansi terkait.

d. Ancaman (*Threats*)

Sama laiknya dengan kelemahan, ancaman merupakan faktor yang memiliki pengaruh negatif yang berasal dari luar organisasi atau instansi dan dapat memengaruhi kecondusifan organisasi atau instansi.

2. Identifikasi Faktor

a. Faktor Lingkungan Internal

Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan internal adalah kekuatan dan kelemahan yang mana dalam hal ini merupakan kekuatan dan kelemahan dari strategi optimalisasi pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban. Dari pengamatan terhadap terlaksanannya kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban, maka dapat ditemukan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh instansi sebagai berikut:

1) Kekuatan (*Strenghts*)

Berikut beberapa faktor kekuatan yang dapat menunjang strategi optimalisasi pembinaan kemandirian:

- a) Pengadaan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lengkap. Fasilitas, sarana, dan prasarana menjadi faktor penunjang pelaksanaan pembinaan kemandirian yang mana dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pembinaan kemandirian. Selain itu, juga dapat memaksimalkan

tenaga WBP dalam menciptakan karya yang berdaya hasil dan berdaya guna tanpa bingung mengenai alat dan bahan yang akan digunakan.

- b) Kerja sama dan dedikasi tinggi petugas pemasyarakatan dalam mendampingi pembinaan. Petugas pemasyarakatan menjadi orang yang bertanggung jawab atas proses pelaksanaan pembinaan. Dengan pertimbangan yang dalam, pembinaan harus didampingi oleh petugas untuk mengantisipasi risiko terjadinya pelanggaran terhadap WBP. Tidak hanya risiko pelanggaran saja, namun pendampingan dari petugas menjadi salah satu alasan pembinaan terutama kemandirian terhadap WBP dapat berjalan dan berhasil secara maksimal karena WBP yang kurang memahami jalannya pembinaan dapat bertanya secara langsung kepada petugas yang mendampingi. Untuk menciptakan kondisi tersebut, dibutuhkan dedikasi yang tinggi dari petugas pemasyarakatan itu sendiri.
- c) Regulasi dan budaya yang berjalan di instansi. Di setiap instansi ataupun organisasi pasti memiliki regulasi yang mengatur setiap program dan berjalannya instansi. Selain itu, budaya yang ada di instansi juga mempengaruhi kondisi lingkungan yang ada. Dengan perpaduan antara regulasi dan budaya yang baik serta dipraktikkan secara strategis, kedua aspek tersebut dapat menciptakan kondisi yang kondusif yang mana dalam hal ini kondisi antar WBP dengan WBP lain, WBP dengan petugas, maupun WBP dengan segala ketentuan yang ditetapkan dan diatur oleh instansi. Dengan terciptanya kondisi yang kondusif, dinilai dapat mempengaruhi pelaksanaan setiap kegiatan atau aktivitas di dalam lapas terutama mengenai kegiatan pembinaan.

2) Kelemahan (*Weaknesses*)

Berikut beberapa faktor kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan kemandirian secara optimal:

- a) Kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan yang ada dibanding dengan yang dibutuhkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa petugas sebagai orang yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembinaan, apabila terjadi kekosongan pendampingan akibat kurangnya jumlah petugas karena ada yang melakukan cuti dan lain sebagainya, maka risiko-risiko yang telah dipetakan memiliki kemungkinan terjadi yang cukup besar.

- b) Sosialisasi dan pemasaran yang kurang maksimal. Banyak masyarakat masih memandang sebelah mata seseorang yang disebut sebagai WBP sehingga ketika masyarakat dihadapkan dengan produk hasil karya WBP cenderung tidak berminat untuk membeli dengan mayoritas penilaian bahwa produk tersebut tidak higienis dan lebih baik daripada produk lain. Hal ini dapat dianalogikan seperti fenomena masyarakat yang lebih senang membeli produk luar negeri daripada produk lokal asli Indonesia. Berubahnya paradigma masyarakat mengenai WBP tidak dapat terjadi tanpa adanya campur tangan pihak pemasyarakatan secara langsung. Kurangnya sosialisasi dan inovasi pemasaran mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan karena tidak seimbang antara modal dengan pemasukan dari karya WBP.
- c) WBP yang sulit untuk ikut berkontribusi dalam program pembinaan. Terkadang ada WBP yang sulit untuk diajak mengikuti program pembinaan yang telah disediakan oleh lapas. Berbagai upaya telah dilakukan baik melalui pendekatan hingga pemberian ancaman dan hukuman. Namun, masih ada saja yang tidak mau ikut melaksanakan program pembinaan sehingga program pembinaan tidak dapat terlaksana dengan optimal karena berarti fungsi pemasyarakatan dalam hal membina tidak terlaksana secara maksimal.

b. Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori eksternal adalah peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi upaya strategi optimalisasi pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Dari pengamatan terhadap terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban, maka dapat ditemukan faktor-faktor peluang dan ancaman yang berasal dari luar instansi sebagai berikut:

1) Peluang (*Opportunities*)

Berikut beberapa faktor peluang yang dapat menunjang strategi optimalisasi pembinaan kemandirian:

- a) Kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama dengan pihak ketiga disini berarti bahwa instansi dapat menjalin kerja sama dengan organisasi atau instansi tertentu untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini lapas dapat menjalin kerja sama dengan BLKI (Badan Latihan Kerja Indonesia),

perpustakaan daerah, perhutani, dan berbagai instansi lainnya. Tujuan menjalin kerja sama ini adalah agar pembinaan dapat berjalan secara optimal karena kegiatan-kegiatan pembinaan dilaksanakan sesuai dengan ilmu dan tata cara yang ada. Selain itu, upaya menjalin kerja sama dengan pihak ketiga juga dapat membantu lapas dalam menyediakan area atau wilayah yang digunakan untuk mendukung program pembinaan dengan tanpa biaya sewa yang membuat pengeluaran anggaran membengkak karena lapas dinilai kurang memiliki area yang luas dan anggaran yang minim.

- b) Melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan hubungan yang terjalin baik dengan wartawan daerah. Media massa baik elektronik maupun non elektronik menjadi salah satu wadah *marketing* yang paling ideal karena cepat, tepat, dan luas. Media juga menjadi alat pengubah opini masyarakat melalui tayangan maupun tulisan yang diciptakan. Hubungan yang sudah terjalin baik dengan wartawan dapat membantu meningkatkan nilai lapas bahkan WBP itu sendiri, sehingga upaya pemasaran produk dapat mencapai target yang telah ditentukan dan secara tidak langsung dapat memotivasi WBP untuk menjadi lebih baik lagi.
- c) Lokasi lapas yang strategis yakni berdekatan dengan instansi-instansi pemerintah. Lokasi lapas saat ini sangat strategis, selain karena memang berada di tengah kota, Tuban merupakan kabupaten kecil yang menempatkan instansi-instansi pemerintahannya secara terpusat. Dengan adanya hal ini maka dapat mendukung lapas ketika hendak menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah lain yang dapat menunjang pembinaan yang optimal karena jarak yang dekat dan mobilitas yang mudah.

2) Ancaman (*Threats*)

Berikut beberapa faktor ancaman dari luar instansi yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan kemandirian secara optimal:

- a) Masyarakat yang belum memahami program pembinaan WBP yang dilakukan di luar lapas. Adanya masyarakat yang belum memahami hal ini dapat menimbulkan *statement* yang cenderung negatif yang dapat berdampak pada citra pemasyarakatan sehingga mempengaruhi setiap komponen pemasyarakatan.

- b) Penyelundupan barang-barang terlarang melalui WBP yang melakukan asimilasi di luar lapas. Risiko terjadinya penyelundupan ini juga dapat dipertimbangkan, karena tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terjadi melihat kondisi WBP yang sebelumnya merupakan orang yang “bermasalah”. Jika sampai terjadi fenomena ini, maka dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan pembinaan kedepannya.
- c) Lingkungan sosial yang digunakan sebagai area pembinaan kurang kondusif. Lingkungan yang kurang kondusif dapat memancing atau memicu WBP untuk bertindak menyimpang karena sebenarnya WBP melakukan pembinaan merupakan salah satu bentuk *healing teraphy* agar dapat kembali menjadi seseorang yang baik dan bertanggung jawab. Jika hal yang dikhawatirkan tersebut terjadi, maka pembinaan tidak dapat dikatakan terlaksana dengan optimal.

3. Analisis SWOT

a. Analisis Matriks IFAS (*Internal Factors Analysis System*)

Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dari wawancara petugas masyarakatan khususnya yang berkelut dalam bagian pembinaan kemandirian WBP terkait faktor internal yang berkaitan dengan upaya pencapaian pembinaan kemandirian yang optimal, dapat dilihat melalui matriks berikut:

| | No. | FAKTOR STRATEGIS LINGKUNGAN INTERNAL | Bobot | Rating | Skor | |
|------------------|-----|---|-------|--------|------|--------------------------------|
| KEKUATAN | 1. | Pengadaan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lengkap | 0.16 | 3 | 0.48 | Jumlah Kekuat an 1.76 |
| | 2. | Kerja sama dan dedikasi tinggi petugas masyarakatan dalam mendampingi pembinaan | 0.2 | 4 | 0.8 | |
| | 3. | Regulasi dan budaya yang berjalan di instansi | 0.16 | 3 | 0.48 | |
| KELEMAHAN | 4. | Kurangnya jumlah petugas masyarakatan yang ada dibanding dengan yang dibutuhkan | 0.2 | 5 | 1 | Jumlah Kelema han 2 |
| | 5. | Sosialisasi dan pemasaran yang kurang maksimal | 0.12 | 3 | 0.36 | |
| | 6. | WBP yang sulit untuk ikut | 0.16 | 4 | 0.64 | |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|------|--|--|--|
| | berkontribusi dalam program pembinaan | | | | |
| Jumlah | | 1.00 | | | |

Ket. :

Bobot adalah perbandingan berpasangan antara faktor-faktor lingkungan berdasarkan kepentingan

Rating adalah peringkat besar/kecilnya faktor strategis

Skor adalah perkalian bobot dengan rating

1) KEKUATAN

- a) Faktor pengadaan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lengkap memiliki tingkat signifikansi sebesar 2.5 yang berarti faktor tersebut termasuk signifikan dengan bobot 0.16. Faktor ini memiliki rating sebesar 3 yang berarti faktor tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.48.
- b) Faktor kerja sama dan dedikasi tinggi petugas pemsarakatan dalam mendampingi pembinaan memiliki tingkat signifikansi sebesar 3 yang berarti faktor tersebut termasuk sangat signifikan dengan bobot 0.2. Faktor ini memiliki rating sebesar 4 yang berarti faktor tersebut besar pengaruhnya terhadap optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.8.
- c) Faktor regulasi dan budaya yang berjalan di instansi memiliki tingkat signifikansi sebesar 2.5 yang berarti faktor tersebut termasuk signifikan dengan bobot 0.16. Faktor ini memiliki rating sebesar 3 yang berarti faktor tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap terhadap optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.48.

2) KELEMAHAN

- a) Faktor kurangnya jumlah petugas pemsarakatan yang ada dibanding dengan yang dibutuhkan memiliki tingkat signifikansi sebesar 3 yang berarti faktor tersebut termasuk sangat signifikan dengan bobot 0.2. Faktor ini memiliki rating sebesar 5 yang berarti faktor tersebut sangat besar

pengaruhnya terhadap optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 1.

- b) Faktor sosialisasi dan pemasaran yang kurang maksimal memiliki tingkat signifikansi sebesar 2 yang berarti faktor tersebut termasuk signifikan dengan bobot 0.12. Faktor ini memiliki rating sebesar 3 yang berarti faktor tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.36.
- c) Faktor WBP yang sulit untuk ikut berkontribusi dalam program pembinaan memiliki tingkat signifikansi sebesar 2.5 yang berarti faktor tersebut termasuk signifikan dengan bobot 0.16. Faktor ini memiliki rating sebesar 4 yang berarti faktor tersebut besar pengaruhnya terhadap optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.64.

Nilai faktor strategis lingkungan internal adalah

$$\begin{aligned} \text{KEKUATAN} - \text{KELEMAHAN} &= 1.76 - 2 \\ &= - 0,24 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, diperoleh nilai IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) untuk optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban sebesar $- 0.24$ yang terdiri dari total skor kekuatan sebesar 1.76 dengan skor kekuatan tertinggi sebesar 0.8 yaitu faktor kerja sama dan dedikasi tinggi petugas pemsarakatan dan total skor kelemahan sebesar 2 dengan skor kelemahan tertinggi sebesar 1 yaitu faktor kurangnya jumlah petugas pemsarakatan yang ada dibanding dengan yang dibutuhkan.

b. Analisis Matriks EFAS (*External Factors Analysis System*)

Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dari wawancara petugas pemsarakatan khususnya yang berkelut dalam bagian pembinaan kemandirian WBP terkait faktor eksternal yang berkaitan dengan upaya pencapaian pembinaan kemandirian yang optimal, dapat dilihat melalui matriks berikut:

| No. | Faktor Strategis Lingkungan | Bobot | Rating | Skor |
|-----|-----------------------------|-------|--------|------|
|-----|-----------------------------|-------|--------|------|

| | | Eksternal | | | | |
|---------|----|---|------|---|------|------------------------|
| PELUANG | 1. | Kerja sama dengan pihak ketiga | 0.15 | 3 | 0.45 | Jumlah Peluang 1.78 |
| | 2. | Melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan hubungan yang terjalin baik dengan wartawan daerah | 0.15 | 3 | 0.45 | |
| | 3. | Lokasi lapas yang strategis yakni berdekatan dengan instansi-instansi pemerintah | 0.22 | 4 | 0.88 | |
| ANCAMAN | 4. | Penyelundupan barang-barang terlarang melalui WBP yang melakukan asimilasi di luar lapas | 0.22 | 5 | 1.1 | Jumlah Ancaman 1.92 |
| | 5. | Masyarakat yang belum memahami program pembinaan WBP yang dilakukan di luar lapas | 0.11 | 2 | 0.22 | |
| | 6. | Lingkungan sosial yang digunakan sebagai area pembinaan kurang kondusif | 0.15 | 4 | 0.6 | |
| Jumlah | | | 1 | | | |

Ket. :

Bobot adalah perbandingan berpasangan antara faktor-faktor lingkungan berdasarkan kepentingan

Rating adalah peringkat besar/kecilnya faktor strategis

Skor adalah perkalian bobot dengan rating

1) PELUANG

- a) Faktor kerja sama dengan pihak ketiga memiliki tingkat signifikansi sebesar 2 yang berarti faktor tersebut termasuk signifikan dengan bobot 0.15. Faktor ini memiliki rating sebesar 3 yang berarti faktor tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap optimalisasi pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.45.
- b) Faktor melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan hubungan yang terjalin baik dengan wartawan daerah memiliki tingkat signifikansi sebesar 2 yang berarti faktor tersebut termasuk signifikan dengan bobot 0.15. Faktor ini memiliki rating sebesar 3 yang berarti faktor tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap optimalisasi pembinaan kemandirian di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.45.

- c) Faktor lokasi lapas yang strategis yakni berdekatan dengan instansi-instansi pemerintah memiliki tingkat signifikansi sebesar 3 yang berarti faktor tersebut termasuk sangat signifikan dengan bobot 0.22. Faktor ini memiliki rating sebesar 4 yang berarti faktor tersebut besar pengaruhnya terhadap optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.88.

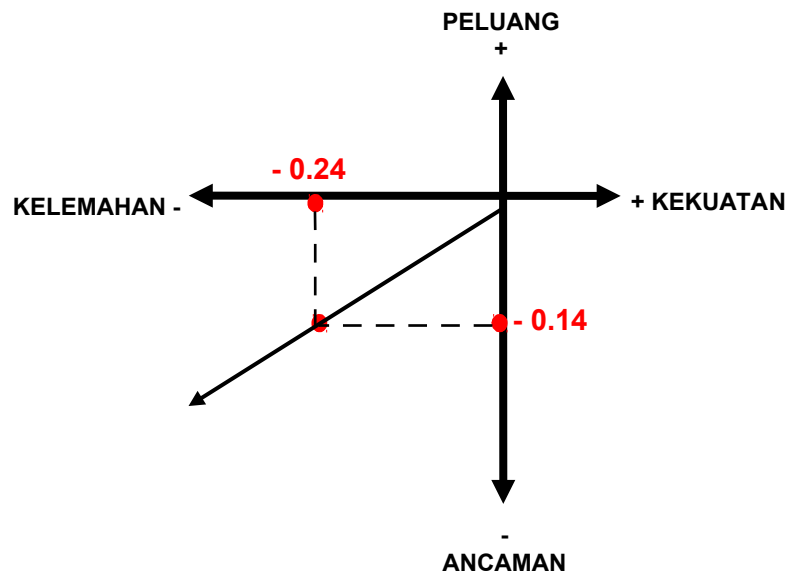
2) ANCAMAN

- a) Faktor penyelundupan barang-barang terlarang melalui WBP yang melakukan asimilasi di luar lapas memiliki tingkat signifikansi sebesar 3 yang berarti faktor tersebut termasuk sangat signifikan dengan bobot 0.22. Faktor ini memiliki rating sebesar 5 yang berarti faktor tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 1.1.
- b) Faktor masyarakat yang belum memahami program pembinaan WBP yang dilakukan di luar lapas memiliki tingkat signifikansi sebesar 1.5 yang berarti faktor tersebut termasuk kurang signifikan dengan bobot 0.11. Faktor ini memiliki rating sebesar 2 yang berarti faktor tersebut cukup kecil pengaruhnya optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.22.
- c) Faktor tingkat lingkungan sosial yang digunakan sebagai area pembinaan kurang kondusif memiliki tingkat signifikansi sebesar 2 yang berarti faktor tersebut termasuk signifikan dengan bobot 0.15. Faktor ini memiliki rating sebesar 4 yang berarti faktor tersebut besar pengaruhnya terhadap optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.6.

Nilai faktor strategis lingkungan eksternal adalah

$$\begin{aligned} \text{PELUANG} - \text{ANCAMAN} &= 1.78 - 1.92 \\ &= - 0.14 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, diperoleh nilai EFAS (*External Factor Analysis Summary*) untuk optimalisasi pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban sebesar -0.14 yang terdiri dari total skor peluang sebesar 1.78 dengan skor peluang tertinggi sebesar 0.88 yaitu faktor lokasi lapas yang strategis yakni berdekatan dengan instansi-instansi pemerintah dan total skor ancaman sebesar 1.92 dengan skor ancaman tertinggi sebesar 1.1 yaitu faktor penyelundupan barang-barang terlarang melalui WBP yang melakukan asimilasi di luar lapas.



Berdasarkan tabel perhitungan IFAS dan EFAS sebelumnya, dapat digambarkan melalui bentuk grafik dengan poros sumbu x dan y seperti gambar di atas. Dari gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa hasil penghitungan skor IFAS dan EFAS bertemu di kuadran IV yang mana menyimpulkan bahwa kondisi organisasi Lapas/Rutan X dalam keadaan lemah dan menghadapi tantangan berupa ancaman. Maka dari itu, strategi yang disarankan adalah strategi defensif/bertahan.

Kesimpulan

Matriks SWOT merupakan alat yang digunakan untuk menyusun faktor internal dan eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara jelas sehingga dapat membantu menentukan strategi alternatif yang cocok untuk digunakan dalam upaya optimalisasi pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban.

| | | |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p> | <p>Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lengkap 2. Kerja sama dan dedikasi tinggi petugas masyarakat dalam mendampingi pembinaan 3. Regulasi dan budaya yang berjalan di instansi | <p>Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah petugas masyarakat yang ada dibanding dengan yang dibutuhkan 2. Sosialisasi dan pemasaran yang kurang maksimal 3. WBP yang sulit untuk ikut berkontribusi dalam program pembinaan |
| <p>Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dengan pihak ketiga 2. Melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan hubungan yang terjalin baik dengan wartawan daerah 3. Lokasi lapas yang strategis yakni berdekatan dengan instansi-instansi pemerintah | <p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi fasilitas, sarana, dan prasarana dengan kerja sama bersama pihak ketiga baik dari instansi maupun perorangan 2. Melakukan publikasi mengenai kegiatan pembinaan WBP dan kondisi di dalam lapas melalui media yang diterbitkan oleh wartawan daerah 3. Menciptakan budaya dalam instansi dan regulasi yang ideal bagi setiap komponen yang tersusun di dalam organisasi dalam hal ini petugas dan WBP sehingga dapat tercipta | <p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah petugas masyarakat dan meminta bantuan atau berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya atau bahkan bersama LSM setempat terkait dengan pembinaan kemandirian WBP 2. Melakukan sosialisasi dan pemasaran melalui media massa dengan memanfaatkan wartawan yang ada di daerah masing-masing 3. Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada WBP mengenai pentingnya mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian dengan |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>instansi yang lebih kompak dan maksimal</p> <p>4. Menjalin lebih banyak kerja sama dengan instansi pemerintah lain dengan memanfaatkan kestrategisan lokasi yang dekat antara yang satu dengan yang lain</p> | <p>bantuan pihak ketiga yang berkaitan dengan pembinaan kemandirian</p> |
| <p>Threats (T)</p> <p>1. Masyarakat yang belum memahami program pembinaan WBP yang dilakukan di luar lapas</p> <p>2. Penyelundupan barang-barang terlarang melalui WBP yang melakukan asimilasi di luar lapas</p> <p>3. Lingkungan sosial yang digunakan sebagai area pembinaan kurang kondusif</p> | <p>Strategi S-T</p> <p>1. Membentuk tim yang mendapat pelatihan khusus mengenai antisipasi penyelundupan</p> <p>2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemasyarakatan dan seluruh komponennya termasuk WBP</p> | <p>Strategi W-T</p> <p>1. Melakukan penambahan kuota jumlah petugas atau pegawai ehingga dapat melancarkan rencana sosialisasi dan pendampingan pembinaan</p> <p>2. Mendorong WBP dengan diberi motivasi dan sanksi apabila tidak mengikuti kegiatan pembinaan</p> <p>3. Mengawasi gerak-gerik WBP ketika melakukan pembinaan di luar lembaga</p> |

DAFTAR PUSTAKA

I. Jurnal

- Asrida, Tities, R.B. Sularto, A. M. E. S. A. (2017). Peran Masyarakat dalam Proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. *Jurnal Sosial , Asimilasi*, 6(12), 1–16.
- Dwiatmodjo, H. (2013). PELAKSANAAN PIDANA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). *Perspektif*, 18(2), 64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>

- Ilham, A. R. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kependidikan. *Politeknik Ilmu Pemasaran, Indonesia*, 5(1), 1–12.
- Muhammad, M. (2018). Analisis SWOT sebagai Strategi Pengembangan Usahatani Buah Naga Merah (*Hylocereus costaricensis*) Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 11(1), 28. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.11.1.28-37>
- Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. (2014). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasaran Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Administrasi Publik*, 1(6), 1266–1275.
- Samosir, J., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Sikumbang, J. (2017). IMPLEMENTASI ASIMILASI KERJA SOSIAL NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA SOSIAL SEBAGAI UPAYA REINTEGRASI SOSIAL. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wahyudi, N. B. (2017). PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995. 53(9), 1689–1699.
- Widiartana, G. (2017). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana. *Justitia et Pax*, 33(1), 1–23. <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>

II. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasaran, (1995). www.bphn.go.id

III. Situs Internet

Jenderal Pemasaran, D. (n.d.). *Sejarah*. Direktorat Jenderal Pemasaran Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Retrieved April 19, 2021, from [http://www.ditjenpas.go.id/sejarah#:~:text=Istilah pemasaran untuk pertama kali,sebagai tujuan dari pidana penjara](http://www.ditjenpas.go.id/sejarah#:~:text=Istilah%20pemasaran%20untuk%20pertama%20kali,sebagai%20tujuan%20dari%20pidana%20penjara.).